

Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran serta Implikasinya terhadap Capaian Target Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin

Namira Osrinda¹⁾; Arman Delis²⁾

¹⁾ Bappeda Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

²⁾ Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Jambi

Abstract.

This study aimed to analyze the consistency between planning and budgeting as well as the gains at SKPD. Because planning and budgeting at SKPD greatly contributed to the success of the planning and budgeting in the city. SKPD who becomes the object of study is Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin. Assessment of consistency between the programs and activities carried out by using a document Matrik Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP) and cause inconsistent by analyzing the results of indepth interviews. The analysis shows that the consistency between planning and budgeting documents at Bappeda Kabupaten Merangin been consistent. The highest consistency is documents RKA and DPA. The cause is not consistent is the Government's strategic policy areas, political interest, fiscal capacity, lack of quality planning officials and the lack of commitment in maintaining the consistency of planning and budgeting. Analysis of performance achievements at Bappeda Kabupaten Merangin showed that in general the achievement of objectives, programs and activities in accordance with the target that has been set.

Keywords : The Consistency of Planning and Budgeting, and The Achievement of Performance Targets

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta capaian kinerja pada SKPD. Karena perencanaan dan penganggaran di SKPD sangat berkontribusi terhadap suksesnya perencanaan dan penganggaran di daerah. SKPD yang menjadi objek penelitian adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin. Penilaian konsistensi antara program dan kegiatan dokumen dilakukan dengan menggunakan Matrik Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP) dan penyebab ketidak konsistenan dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara mendalam. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran pada Bappeda Kabupaten Merangin sudah konsisten. Konsistensi tertinggi ada pada dokumen RKA dan DPA. Penyebab ketidak konsistenan adalah adanya kebijakan strategis pemerintah daerah, kepentingan politik, kemampuan keuangan daerah, kurangnya kualitas pejabat perencana dan rendahnya komitmen dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran. Analisis capaian kinerja pada Bappeda Kabupaten Merangin menunjukkan bahwa secara umum pencapaian sasaran, program dan kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran, dan Capaian Target Kinerja

PENDAHULUAN

Dalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai ketinggian Kabupaten/Kota. Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Bastian (2006) mendefinisikan anggaran (*budget*) adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang di usulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Mardiasmo (2009) mengemukakan definisi anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Produk perencanaan membutuhkan suatu proses pembuatan yang diawali dengan mengetahui suatu persoalan dengan tepat/benar, kendala, tujuan dan target yang akan dicapai. Kemudian harus dikerjakan oleh perencana yang profesional yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman. SPPN tahun 2004 menetapkan ada lima dokumen perencanaan pembangunan yang perlu disusun oleh badan perencana, baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah, yaitu : 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D) adalah dokumen perencanaan jangka panjang untuk periode selama 20 tahun; 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D) adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 tahun ke depan yang berisikan jabaran lebih kongkrit dari visi dan misi presiden (pada tingkat nasional) atau visi dan misi kepala daerah (untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota); 3) Rencana Strategis (Renstra), lazim disebut sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berisikan jabaran dari visi dan misi kepala SKPD yang diturunkan dari visi dan misi Kepala Daerah. Renstra SKPD lebih rinci sampai ke kegiatan karena ruang lingkupnya lebih kecil, yaitu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari institusi bersangkutan. Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun; 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) / Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana jabaran dari RPJM yang berisikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk 1 tahun (annual planning) sesuai dengan sumber daya yang tersedia pada tahun bersangkutan, khususnya dana. RKPD selanjutnya dijadikan dasar untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD); 5) Rencana Kerja Institusi (Renja) atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) juga merupakan rencana tahunan bersifat operasional yang isinya merupakan jabaran dari Renstra yang dibuat oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tupoksinya.

Adapun dokumen penganggaran yang perlu disusun, yaitu : 1) Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun; 2) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD; 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari s/d tanggal 31 Desember.; 4) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah dokumen penganggaran yang berisikan rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD; 5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Selanjutnya tahapan proses perencanaan anggaran daerah adalah: 1) Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD paling lambat pada pertengahan bulan juni tahun berjalan. Kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada RKPD. Proses penyusunan RKPD tersebut dilakukan antara lain dengan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain adalah asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemuka adat, pemuka agama dan kalangan dunia usaha; 2) DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya; 3) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD; 4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah ditetapkan pemerintah daerah bersama DPRD; 5) RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD; 6) Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya; 7) Pemerintah daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan oktober tahun sebelumnya; 8) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan Perda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

Sejak Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka substansi dan esensi dari sistem perencanaan pembangunan menjadi semakin perlu untuk disempurnakan guna lebih menjamin penyelenggaraan pembangunan dipusat dan daerah yang lebih berhasil guna dan berdayaguna. Berdasarkan hal tersebut maka di setiap daerah otonom dibentuk suatu badan yang dinamakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagaimana halnya di Kabupaten Merangin. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sangat dibutuhkan agar perencanaan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik karena ada lembaga yang bertanggung jawab secara langsung, peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat.

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki

peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sebelum adanya Undang-Undang mengenai masalah konsistensi ini, proses perencanaan dan penganggaran dilakukan secara terpisah sehingga akhirnya muncul inkonsistensi antara rencana yang disusun dengan alokasi belanja dalam proses penganggaran. Kondisi tersebut menyebabkan bias nya alokasi belanja untuk berbagai jenis kegiatan. Hal ini akan bermuara pada inkonsistensi alokasi belanja daerah, padahal masalah utama yang dihadapi adalah terbatasnya sumber pendapatan di daerah sendiri yang dapat digunakan untuk membiayai suatu kegiatan. Pada saat ini Kabupaten Merangin sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Oleh sebab itu diperlukan efisiensi dan efektifitas belanja melalui integrasi antara perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Merangin.

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran tersebut juga mempengaruhi capaian target kinerja suatu organisasi, dengan kata lain bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Dari paparan di atas peneliti merasa tertarik untuk mengkaji sejauh mana konsistensi perencanaan dan penganggaran serta implikasinya terhadap capaian target kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin.

Mengacu pada latar belakang tersebut, tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk: 1) Menganalisis konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin 2) Menganalisis tingkat capaian target kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin 3) Menganalisis implikasi dari konsistensi perencanaan dan penganggaran terhadap capaian target kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan dan desain yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari sumber, baik primer maupun sekunder, serta data yang diperoleh dari observasi dan telaah dokumen secara menyeluruh.
2. Untuk menjawab permasalahan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin dilakukan dengan mengevaluasi beberapa dokumen terkait yaitu PPAS Kabupaten Merangin Tahun 2014-2016, RENJA Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2014-2016, RKA Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2014-2016 dan DPA Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2014-2016. Hasil evaluasi tersebut disusun dalam suatu Matrik Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP), dimana MKPP ini disusun dengan cara melakukan integrasi antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran Bappeda Kabupaten Merangin. MKPP ini disadur berdasarkan Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3. Penentuan konsistensi antara dokumen-dokumen tersebut dilakukan dengan mensinkronkan program dan kegiatan secara nomenklatur. Kegiatan dianggap konsisten apabila terdapat saling keterkaitan, sinkron atau mempunyai maksud dan isi yang sama dengan dokumen yang dibandingkan. Pengukuran konsistensi program dan kegiatan dapat disederhanakan sebagai berikut :

Tabel 1 Pengukuran Konsistensi Perencanaan & Penganggaran

No	Program dan Kegiatan		Penilaian Konsistensi
	Dokumen A	Dokumen B	
1	Ada	Ada	Konsisten
2	Ada	Tidak Ada	Tidak Konsisten
3	Tidak Ada	Ada	Tidak Konsisten

Selanjutnya untuk menentukan tingkat konsistensi secara keseluruhan dari dokumen tersebut dilakukan melalui teknik persentase yaitu :

$$\text{Tingkat konsistensi (\%)} = \frac{\text{Jumlah kegiatan yg konsisten}}{\text{Total kegiatan}} \times 100$$

Tingkatan konsistensi berdasarkan persentase (Sugiyono, 2003) yaitu :

- Sangat buruk : 0,0 – 19,9
- Buruk : 20,0 – 39,9
- Sedang : 40,0 – 59,9
- Baik : 60,0 – 79,9
- Sangat Baik : 80,0 – 100,0

4. Menganalisis capaian kinerja Bappeda yang tertuang pada LAKIP Bappeda Kabupaten Merangin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran pada Bappeda Kabupaten Merangin

Konsistensi perencanaan dan penganggaran dianalisis berdasarkan konsistensi antara dokumen prioritas dan PPAS, RENJA, RKA dan DPA

Konsistensi Dokumen Prioritas dan PPAS dengan Dokumen RENJA

Analisis konsistensi antara PPAS dengan RENJA Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2016 diberikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Konsistensi PPAS dengan RENJA Bappeda Kab. Merangin Tahun 2014-2016

No.	Status Program		2014		2015		2016	
			Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg
1	Konsisten	Jumlah	16	69	20	71	17	60
		%	84,21	86,25	100	95,95	80,95	84,51
2	Tidak Konsisten	Jumlah	3	11	-	3	4	11
		%	15,79	13,75	-	4,05	19,05	15,49

Sumber : PPAS dan RENJA Bappeda kab. Merangin tahun 2014, 2015 dan 2016

Konsistensi antara PPAS dengan RENJA Tahun 2014

PPAS Kabupaten Merangin Tahun 2014 terdapat 19 program dan 80 kegiatan dan RENJA Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2014 terdapat 16 program dan 70 kegiatan. Tabel 5.1 menunjukkan bahwa dari 19 program pada PPAS terdapat 16 program yang sesuai dengan program pada RENJA sedangkan sisanya 3 program tidak sesuai dengan program pada RENJA, artinya 84,21% program pada PPAS konsisten dan sisanya 15,79% tidak konsisten. Dari 80 kegiatan pada PPAS terdapat 69 kegiatan

sesuai dengan kegiatan pada RENJA sedangkan sisanya 11 kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan pada RENJA, artinya 86,25% kegiatan pada PPAS konsisten dan sisanya 13,75% tidak konsisten. Hal ini menandakan bahwa penyusunan PPAS tidak berlandaskan RENJA sepenuhnya.

Konsistensi antara PPAS dengan RENJA Tahun 2015

PPAS Kabupaten Merangin Tahun 2015 terdapat 20 program dan 74 kegiatan dan di RENJA Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2015 terdapat 21 program dan 78 kegiatan. Tabel 5.1 menunjukkan bahwa dari 20 program pada PPAS terdapat 20 program yang sesuai dengan program pada RENJA, artinya 100% program pada PPAS konsisten. Dari 74 kegiatan pada PPAS terdapat 71 kegiatan sesuai dengan kegiatan pada RENJA sedangkan sisanya 3 kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan pada RENJA, artinya 95,95% kegiatan pada PPAS konsisten dan sisanya 4,05% tidak konsisten. Hal ini menandakan bahwa penyusunan PPAS tidak berlandaskan RENJA sepenuhnya.

Konsistensi antara PPAS dengan RENJA Tahun 2016

PPAS Kabupaten Merangin Tahun 2016 terdapat 21 program dan 71 kegiatan dan di RENJA Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2016 terdapat 21 program dan 75 kegiatan. Tabel 5.1 menunjukkan bahwa dari 21 program pada PPAS terdapat 17 program yang sesuai dengan program pada RENJA, sedangkan sisanya 4 program tidak sesuai dengan program pada RENJA, artinya 80,95% program pada PPAS konsisten dan sisanya 19,05% tidak konsisten. Dari 71 kegiatan pada PPAS terdapat 60 kegiatan sesuai dengan kegiatan pada RENJA sedangkan sisanya 11 kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan pada RENJA, artinya 84,51% kegiatan pada PPAS konsisten dan sisanya 15,49% tidak konsisten. Hal ini menandakan bahwa penyusunan PPAS tidak berlandaskan RENJA sepenuhnya.

Konsistensi Antara Dokumen RENJA dengan Dokumen RKA

Konsistensi antara RENJA dengan RKA Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2014-2016 diberikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Konsistensi RENJA dengan RKA Bappeda Kab. Merangin Tahun 2014-2016

No.	Status Program		2014		2015		2016	
			Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg
1	Konsisten	Jumlah	16	69	20	71	17	60
		%	84,21	86,25	100	95,95	80,95	84,51
2	Tidak Konsisten	Jumlah	3	11	-	3	4	11
		%	15,79	13,75	-	4,05	19,05	15,49

Sumber : RENJA dan RKA Bappeda kab. Merangin tahun 2014, 2015 dan 2016

Konsistensi antara RENJA dengan RKA Tahun 2014

RKA Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2014 terdapat 19 program dan 80 kegiatan dan di RENJA Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2014 terdapat 16 program dan 70 kegiatan. Tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 19 program pada RKA terdapat 16 program yang sesuai dengan program pada RENJA sedangkan sisanya 3 program tidak sesuai dengan program pada RENJA, artinya 84,21% program pada RKA konsisten dan sisanya 15,79% tidak konsisten. Dari 80 kegiatan pada RKA terdapat 69 kegiatan sesuai dengan kegiatan pada RENJA sedangkan sisanya 11 kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan pada RENJA, artinya 86,25% kegiatan pada RKA konsisten dan sisanya 13,75% tidak konsisten. Hal ini menandakan bahwa penyusunan RKA tidak berlandaskan RENJA sepenuhnya.

Konsistensi antara RENJA dengan RKA Tahun 2015

RKA Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2015 terdapat 20 program dan 74 kegiatan dan di RENJA Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2015 terdapat 21 program dan 78 kegiatan. Tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 20 program pada RKA terdapat 20 program yang sesuai dengan program pada RENJA, artinya 100% program pada RKA konsisten. Dari 74 kegiatan pada RKA terdapat 71 kegiatan sesuai dengan kegiatan pada RENJA sedangkan sisanya 3 kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan pada RENJA, artinya 95,95% kegiatan pada RKA konsisten dan sisanya 4,05% tidak konsisten. Hal ini menandakan bahwa penyusunan RKA tidak berlandaskan RENJA sepenuhnya.

Konsistensi antara RENJA dengan RKA Tahun 2016

RKA Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2016 terdapat 21 program dan 71 kegiatan dan di RENJA Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2016 terdapat 21 program dan 75 kegiatan. Tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 21 program pada RKA terdapat 17 program yang sesuai dengan program pada RENJA sedangkan sisanya 4 program tidak sesuai dengan program pada RENJA, artinya 80,95% program pada RKA konsisten dan sisanya 19,05% tidak konsisten. Dari 71 kegiatan pada RKA terdapat 60 kegiatan sesuai dengan kegiatan pada RENJA sedangkan sisanya 11 kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan pada RENJA, artinya 84,51% kegiatan pada RKA konsisten dan sisanya 15,49% tidak konsisten. Hal ini menandakan bahwa penyusunan RKA tidak berlandaskan RENJA sepenuhnya.

Konsistensi Dokumen RKA dengan DPA

Konsistensi antara RKA dengan DPA Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2014-2016 diberikan pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Konsistensi antara RKA dengan DPA Bappeda Kab. Merangin Tahun 2014-2016

No.	Status Program		2014		2015		2016	
			Prog	Keg	Prog	Keg	Prog	Keg
1	Konsisten	Jumlah	19	80	20	74	21	71
		%	100	100	100	100	100	100
2	Tidak Konsisten	Jumlah	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-

Sumber : RKA dan DPA Bappeda kab. Merangin tahun 2014, 2015 dan 2016

Konsistensi antara RKA dengan DPA Tahun 2014

DPA Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2014 terdapat 19 program dan 80 kegiatan dan di RKA Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2014 terdapat 19 program dan 80 kegiatan. Tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari 19 program pada DPA terdapat 19 program yang sesuai dengan program pada RKA, artinya 100% program pada DPA konsisten. Dari 80 kegiatan pada DPA terdapat 80 kegiatan sesuai dengan kegiatan pada RKA, artinya 100% kegiatan pada DPA konsisten. Hal ini menandakan bahwa penyusunan DPA berlandaskan RKA sepenuhnya. Seluruh program dan kegiatan pada RKA dan DPA sinkron satu sama lain.

Konsistensi antara RKA dengan DPA Tahun 2015

DPA Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2015 terdapat 20 program dan 74 kegiatan dan di RKA Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2015 terdapat 20 program dan 74 kegiatan. Tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari 20 program pada DPA terdapat 20 program yang sesuai dengan program pada RKA, artinya 100% program pada DPA konsisten. Dari 74 kegiatan pada DPA terdapat 74 kegiatan sesuai dengan kegiatan pada RKA, artinya 100% kegiatan pada DPA konsisten. Hal ini menandakan bahwa

penyusunan DPA berlandaskan RKA sepenuhnya. Seluruh program dan kegiatan pada RKA dan DPA sinkron satu sama lain.

Konsistensi antara RKA dengan DPA Tahun 2016

DPA Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2016 terdapat 21 program dan 71 kegiatan dan di RKA Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2016 terdapat 21 program dan 71 kegiatan. Tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari 21 program pada DPA terdapat 21 program yang sesuai dengan program pada RKA, artinya 100% program pada DPA konsisten. Dari 71 kegiatan pada DPA terdapat 71 kegiatan sesuai dengan kegiatan pada RKA, artinya 100% kegiatan pada DPA konsisten. Hal ini menandakan bahwa penyusunan DPA berlandaskan RKA sepenuhnya. Seluruh program dan kegiatan pada RKA dan DPA sinkron satu sama lain.

Secara keseluruhan dari seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran pada Bappeda Kabupaten Merangin dari Tahun 2014-2016, menunjukkan konsistensi yang bagus, artinya keterkaitan dan keseimbangan antara perencanaan dan penganggaran Bappeda Kabupaten Merangin adalah baik. Perlu diperhatikan bahwa konsistensi perencanaan dan penganggaran ini merupakan hal yang sangat penting dalam mengelola pembangunan daerah secara efisien dan efektif.

Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Merangin

Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2014

Secara umum pencapaian sasaran, program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2014, telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau dengan kata lain telah dilaksanakan sebesar 100%.

Realisasi Anggaran Bappeda Kab. Merangin Tahun 2014

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, total anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2014 adalah Rp. 15.489.284.300,- (Lima belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah). Dari anggaran tersebut, dipergunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.145.755.000,- (Tiga milyar seratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan untuk belanja langsung sebesar Rp. 12.343.529.300,- (Dua belas milyar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Secara total, seluruh belanja kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin yang dianggarkan di Tahun Anggaran 2014 telah direalisasikan sebesar Rp. 11.123.493.900,- (Sebelas milyar seratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) atau 90,12%.

Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2015

Secara umum pencapaian sasaran, program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2015, tidak dapat terealisasi 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau dengan kata lain hanya terlaksana sebesar 89,83%. Hal ini dikarenakan adanya program dan kegiatan baru dan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memerlukan penyesuaian-penyesuaian.

Realisasi Anggaran Bappeda Kab. Merangin Tahun 2015

Realisasi keuangan Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2015 secara keseluruhan mencapai 93,93% atau sebesar Rp.10.218.960.888,- dari jumlah anggaran setelah APBD Perubahan Tahun 2015 Rp.10.878.484,25,-. Anggaran ini digunakan

untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.7.741.555.842,25,- dengan realisasi sebesar Rp.7.205.538.726,- atau 93,07% dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.3.136.929.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.013.422.162,- atau 96,06%.

Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran serta Implikasinya Terhadap Capaian Target Kinerja pada Bappeda Kabupaten Merangin

Berdasarkan analisis konsistensi perencanaan dan penganggaran yang dilakukan dapat dikemukakan beberapa hal berikut:

1. Untuk analisis konsistensi antara PPAS dan RENJA Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2014-2016 sudah cukup konsisten. Dimana hasil dari analisis konsistensi tersebut menunjukkan bahwa konsistensi antar program sebesar 88,39% dan konsistensi antar kegiatan sebesar 88,90%, hal ini menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik. Namun masih ada beberapa program dan kegiatan yang tidak masuk pada PPAS atau sebaliknya ada di PPAS tapi tidak ada di RENJA. Hal ini menunjukkan bahwa RENJA tidak menjadi acuan yang mendasar bagi penyusunan PPAS setiap tahunnya.
2. Untuk analisis konsistensi antara RENJA dan RKA Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2014-2016 sudah cukup konsisten. Dimana hasil dari analisis konsistensi tersebut menunjukkan bahwa konsistensi antar program sebesar 88,39% dan konsistensi antar kegiatan sebesar 88,90%, hal ini menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik. Namun masih ada beberapa program dan kegiatan yang tidak masuk pada RKA atau sebaliknya ada di RKA tapi tidak ada di RENJA. Hal ini menunjukkan bahwa RENJA tidak menjadi acuan yang mendasar bagi penyusunan RKA setiap tahunnya.
3. Untuk analisis konsistensi antara RKA dan DPA Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2014-2016 sangat konsisten. Dimana hasil dari analisis konsistensi tersebut menunjukkan bahwa konsistensi antar program sebesar 100% dan konsistensi antar kegiatan sebesar 100%, hal ini menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik. Seluruh program dan kegiatan pada RKA dan DPA sinkron satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa RKA menjadi acuan yang mendasar bagi penyusunan DPA setiap tahunnya.

Dari hasil analisis diatas, menunjukkan bahwa konsistensi tertinggi ada pada dokumen RKA dan DPA. Seluruh program dan kegiatan pada RKA dan DPA sinkron satu sama lain. Sedangkan konsistensi antara PPAS dan RENJA maupun RENJA dan RKA masih kurang konsisten dimana adanya penambahan atau pengurangan program dan kegiatan pada setiap dokumen tersebut, berarti penyusunan PPAS tidak berlandaskan RENJA dan penyusunan RKA tidak berlandaskan RENJA sepenuhnya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Inkonsistensi tersebut terjadi dikarenakan adanya kebijakan strategis pemerintah daerah, kepentingan politik, kemampuan keuangan daerah, kurangnya kualitas SDM/pejabat perencana, tidak tertampungnya kegiatan yang diusulkan, pimpinan daerah yang kurang memperhatikan proses perencanaan dan penganggarnya serta kebijakannya yang sering menggonta-ganti para pemegang kebijakan dan rendahnya komitmen dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran tersebut.

Analisis capaian kinerja pada Bappeda Kabupaten Merangin menunjukkan bahwa secara umum pencapaian sasaran, program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014 telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau dengan kata lain telah dilaksanakan sebesar 100%. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2015, tidak dapat terealisasi 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan hanya terlaksana

sebesar 89,83%. Hal ini dikarenakan adanya program dan kegiatan baru dan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memerlukan penyesuaian-penyesuaian.

Untuk itu perlu dirumuskan suatu strategi dan kebijakan agar konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Bappeda Kabupaten Merangin dapat terus ditingkatkan sehingga seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai sepenuhnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Konsistensi antara PPAS dan RENJA Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2014-2016 sudah cukup konsisten. Dimana hasil dari analisis konsistensi tersebut menunjukkan bahwa konsistensi antar program sebesar 88,39% dan konsistensi antar kegiatan sebesar 88,90%, hal ini menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik. Namun masih ada beberapa program dan kegiatan yang tidak masuk pada PPAS atau sebaliknya ada di PPAS tapi tidak ada di RENJA. Hal ini menunjukkan bahwa RENJA tidak menjadi acuan yang mendasar bagi penyusunan PPAS setiap tahunnya.
2. Konsistensi antara RENJA dan RKA Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2014-2016 sudah cukup konsisten. Dimana hasil dari analisis konsistensi tersebut menunjukkan bahwa konsistensi antar program sebesar 88,39% dan konsistensi antar kegiatan sebesar 88,90%, hal ini menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik. Namun masih ada beberapa program dan kegiatan yang tidak masuk pada RKA atau sebaliknya ada di RKA tapi tidak ada di RENJA. Hal ini menunjukkan bahwa RENJA tidak menjadi acuan yang mendasar bagi penyusunan RKA setiap tahunnya.
3. Konsistensi antara RKA dan DPA Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2014-2016 sangat konsisten. Dimana hasil dari analisis konsistensi tersebut menunjukkan bahwa konsistensi antar program sebesar 100% dan konsistensi antar kegiatan sebesar 100%, hal ini menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik. Seluruh program dan kegiatan pada RKA dan DPA sinkron satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa RKA menjadi acuan yang mendasar bagi penyusunan DPA setiap tahunnya.
4. Konsistensi tertinggi ada pada dokumen RKA dan DPA. Seluruh program dan kegiatan pada RKA dan DPA sinkron satu sama lain. Sedangkan konsistensi antara PPAS dan RENJA maupun RENJA dan RKA masih kurang konsisten dimana adanya penambahan atau pengurangan program dan kegiatan pada setiap dokumen tersebut, berarti penyusunan PPAS tidak berlandaskan RENJA dan penyusunan RKA tidak berlandaskan RENJA sepenuhnya.
5. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Inkonsistensi tersebut terjadi dikarenakan adanya kebijakan strategis pemerintah daerah, kepentingan politik, kemampuan keuangan daerah, kurangnya kualitas SDM/pejabat perencana, tidak tertampungnya kegiatan yang diusulkan, pimpinan daerah yang kurang memperhatikan proses perencanaan dan penganggarnya serta kebijakannya yang sering menggonta-ganti para pemegang kebijakan dan rendahnya komitmen dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran tersebut.
6. Analisis capaian kinerja pada Bappeda Kabupaten Merangin menunjukkan bahwa secara umum pencapaian sasaran, program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014 telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau dengan kata lain telah dilaksanakan sebesar 100%. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2015,

tidak dapat terealisasi 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan hanya terlaksana sebesar 89,83%. Hal ini dikarenakan adanya program dan kegiatan baru dan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memerlukan penyesuaian-penyesuaian.

7. Implikasi dari konsistensi perencanaan dan penganggaran terhadap capaian kinerja pada Bappeda Kabupaten Merangin adalah tercapainya seluruh target kinerja yang telah ditetapkan.

Saran

Dalam rangka meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Bappeda Kabupaten Merangin direkomendasikan untuk meningkatkan intensitas informasi dan komunikasi dengan pemerintah yang lebih tinggi, meningkatkan kualitas SDM/pejabat perencana dalam membuat setiap kegiatan yang diajukan, meningkatkan pengetahuan aparatur yang terkait dalam penyusunan anggaran serta meningkatkan komitmen dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kani, Dewi Marhaeni Diah Herawati, Laksono Trisnantoro. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*.2012; Vol. 15: 131-139
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Caiden and Wildavsky. 1974. *Planning and Budgeting in Poor Countries*. Google Books
- Carlisle S. *Health Promotion, Advocacy and Health Inequalities: a conceptual framework*. *Oxford Journal Medicine Health Promotion International*.2000; Vol.15/No.4: 369-376
- Conyers, Diana & Hill, Peter. (1984). *An Introduction to Development Planning In The Third World*. The Pitman Press LtdBath. Avon, Scotland
- Denas Symond. Kajian Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2006. *Jurnal JMPK*. 2007; Vol.01/No. 01: 25-31
- Deputi IV BPKP. 2005. *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)*. BPKP. Jakarta
- Ferdinandus Diri Burin, Candra Fajri Ananda, David Kaluge. 2015. Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Vol.6 No.2 Bulan Juli Tahun 2015 Hal 177-188, Universitas Brawijaya Malang
- Harun. 2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Jhingan, M.L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Keban, Yeremias. T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta. Gava Media
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Meldayeni (2011), *Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan di Kota Solok Tahun 2007-2010*, Tesis Pasca Sarjana Universitas Andalas

- Musgrave, Richard A. dan Musgrave, Peggy B. (1989). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Erlangga. Jakarta
- Octavianti, Rini, (2008). *Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Program Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Solok Selatan*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Andalas
- Ramadhiani Fitry (2012), *Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan Kota Lubuklinggau Tahun 2010*. Tesis Program Study Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Program Pascasarjana Universitas Indonesia
- Rasyid Abdul, (2010). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jurnal Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua
- Saifuddin. (2007). *Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Puskesmas Di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2007*. Tesis Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Administrasi Kebijakan Kesehatan. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang
- Sasongko, Catur & Safrida Rumondang Parulian. 2010. *Anggaran*. Jakarta : Salemba Empat.
- Solichah Imrotus Siti, Khusaini, (2013). *Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Tulung Agung (Study pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2010-2012)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
- Sumardi (2010), *Keterkaitan Kebijakan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah*, Journal of Rural and Development Volume 1 No. 1 Februari 2010, FE Universitas Sebelas Maret
- Tan, Syamsurijal. 2012. *Perencanaan Pembangunan (Teori dan Implementasi pada Pembangunan Daerah)*. Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Jambi
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta
- Terry, George. R. (1960) *The Principles of Management*, Third Edition, Homewood Illinois: Richard Irwin
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jilid I. Edisi Kesembilan. Erlangga. Jakarta
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Wahyuningsih, Rutiana D, (2007). *Responsibilitas Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Daerah*, LGSP
- World Bank (2010), *Modul Pelatihan MKPP+ SKPD Propinsi NTT*, Peach Program World Bank
- Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho F. (2006). *Manajemen Pembangunan Indonesia*. Gramedia/Elexmedia Komputindo. Jakarta